

Katalog/Catalog: 9102067.17



Potensi

# USAHA MIKRO KECIL

PROVINSI BENGKULU



BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BENGKULU



<http://www.bps.go.id>

Potensi  
**USAHA  
MIKRO  
KECIL**  
PROVINSI BENGKULU



**POTENSI USAHA MIKRO KECIL  
PROVINSI BENGKULU**

No. ISBN: -  
No. Publikasi: 17000.1802  
No. Katalog: 9102067.17

Ukuran Buku: 20 cm x 20 cm  
Jumlah Halaman: vi + 31 halaman

Naskah: Bidang Neraca dan Analisis Statistik

Penyunting: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Desain Kover oleh: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh: © Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Tata Letak: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Sumber Ilustrasi: [www.freepik.com](http://www.freepik.com)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

<https://bengkulu.bps.go.id>

# Kata Pengantar



Pada tahun 2016, BPS telah melaksanakan kegiatan pendataan lengkap atau listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016). Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai aktivitas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB), pada tahun 2017 dilakukan SE2016 Lanjutan.

Hasil pendataan SE2016 Lanjutan dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan perumusan kebijakan di antaranya untuk mengukur kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan memberikan gambaran karakteristik/kualitas sumber daya manusia, kondisi aksesibilitas permodalan, prospek usaha, dan kinerja keuangannya. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah untuk membantu pengembangan UMK baik melalui pembinaan maupun penyusunan regulasi yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK. Dengan demikian, peran UMK dalam kegiatan ekonomi lokal semakin kuat. Lapangan pekerjaan pun makin meningkat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan SE2016-Lanjutan.

Bengkulu, Desember 2018  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Bengkulu

  
Dyah Anugrah Kuswardani



# Daftar Isi

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
PENDAHULUAN	1
UMK MENDOMINASI JUMLAH USAHA DI PROVINSI BENGKULU	3
UMK SEBAGAI PENYERAP TENAGA KERJA TERBANYAK	7
PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA	11
PELAKU UMK MAYORITAS PERORANGAN	17
KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN	23
PROSPEK UMK DI MASA MENDATANG	29





# Pendahuluan

**D**unia usaha di Provinsi Bengkulu pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil SE2016 Lanjutan, jumlah usaha ini mencapai lebih dari 195 ribu usaha atau 99,06 persen dari total usaha nonpertanian di Bengkulu. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 463 ribu orang atau sekitar 88,82 persen dari total tenaga kerja nonpertanian. Ketika krisis menerpa Indonesia pada sekitar tahun 1997-1998, UMK terbukti tetap berdiri kokoh di saat usaha-usaha besar lainnya berjatuhan.

Keunggulan UMK dalam bertahan dari badai krisis karena berbagai alasan. Pertama, umumnya UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMK tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Ketiga, umumnya bisnis UMK menggunakan modal relatif rendah. Dengan keunggulan tersebut, UMK tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam.

Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, UMK juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak mampu untuk berkembang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah; dikelola dengan cara yang sederhana; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor.

Mengingat pentingnya peran UMK dalam menggerakkan roda perekonomian Provinsi Bengkulu, hendaknya kendala dan keterbatasan tersebut tidak menyurutkan pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Peluang untuk mengembangkan bisnis UMK terbuka lebar jika pelaku UMK mampu membaca situasi pasar. UMK mempunyai peran yang penting khususnya pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam maupun padat tenaga kerja.

Untuk melihat potensi dan kinerja UMK saat ini, serta untuk melihat prospeknya di masa mendatang, perlu melakukan analisis kinerja UMK. Hal ini juga bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan melalui pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi. Dengan adanya identifikasi kinerja UMK dan permasalahan yang dihadapi, maka akan memberikan sumbangsih dalam penyusunan regulasi atau kebijakan yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK.



---

**UMK  
MENDOMINASI  
JUMLAH  
USAHA DI  
PROVINSI  
BENGKULU**

---

Bagian

1

<https://bengkulu.bps.go.id>

UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Provinsi Bengkulu. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan sebagai wadah usaha yang menghasilkan nilai ekonomi. Usaha ini menjadi pilihan utama karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, UMK berperan sebagai *basic* pembangunan ekonomi kerakyatan.

Persentase UMK di Provinsi Bengkulu mencapai 99,06 persen dari total jumlah usaha nonpertanian yang tercatat. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori nonpertanian. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah sekitar lebih dari 103 ribu usaha atau mencapai lebih dari 50 persen. Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) dan usaha Industri Pengolahan (Kategori C) juga mempunyai kontribusi yang besar, masing-masing berkontribusi lebih dari 10 persen.

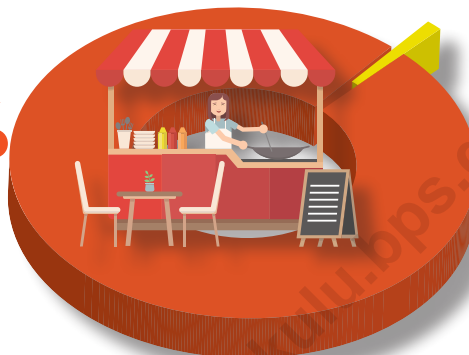
Sebagai Ibu Kota Provinsi, Kota Bengkulu menjadi pusat pergerakan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Dari 10 kabupaten/kota, jumlah UMK di Kota Bengkulu mencapai 21,60 persen. Pada posisi kedua dan ketiga, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara merupakan dua wilayah dengan jumlah UMK lebih dari 10 persen di Provinsi Bengkulu.

UMK  
MENDOMINASI  
JUMLAH  
USAHA DI  
PROVINSI BENGKULU

**Gambar 1.1.**  
**Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Usaha, 2016**

**99,06%**

Usaha  
 Mikro  
 Kecil

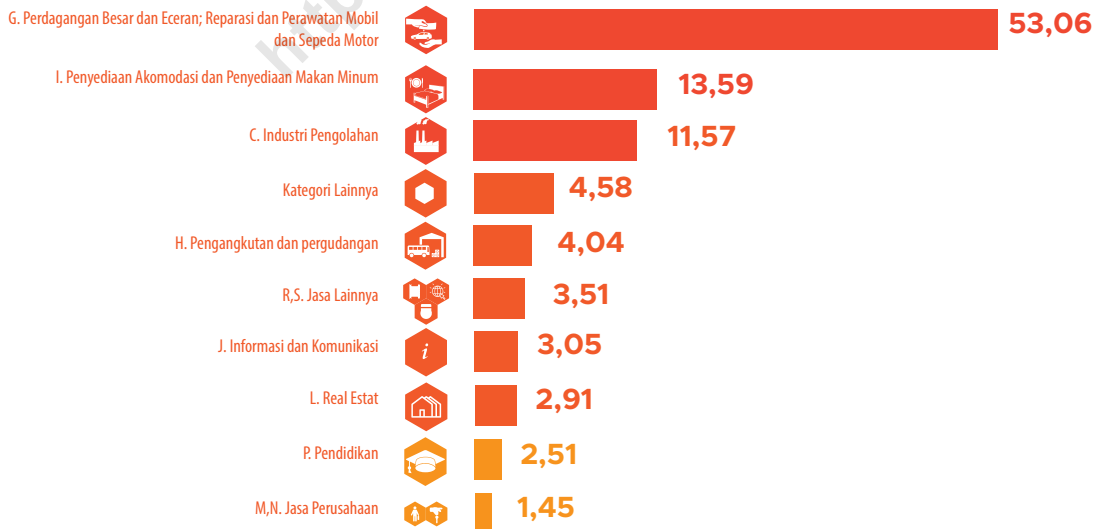


**0,94%**

Usaha  
 Menengah  
 Besar

Sumber: BPS, SE2016-L

**Gambar 1.2.**  
**Persentase Jumlah UMK Menurut Kategori, 2017**



Sumber: BPS, SE2016-L

**Tabel 1.**  
**Jumlah dan Persentase UMK Menurut Kabupaten/Kota, 2017**

Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase (%)
Bengkulu Selatan	15.461	7,90
Rejang Lebong	26.879	13,73
Bengkulu Utara	26.152	13,36
Kaur	10.271	5,25
Seluma	18.950	9,68
Mukomuko	20.898	10,67
Lebong	11.217	5,73
Kepahiang	12.877	6,58
Bengkulu Tengah	10.796	5,51
Kota Bengkulu	42.275	21,59
<b>Bengkulu</b>	<b>644.099</b>	<b>100,00</b>



---

**UMK  
SEBAGAI  
PENYERAP  
TENAGA KERJA  
TERBANYAK**

---

Bagian

**2**

<https://bengkulu.bps.go.id>

Jumlah UMK yang sangat besar di Provinsi Bengkulu tentunya sangat berperan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Berdasarkan data Sakernas dalam Publikasi Keadaan Pasar Tenaga Kerja 2017, pengangguran di Provinsi Bengkulu mencapai 3,74 persen, terbanyak pada lulusan pendidikan menengah yang mencapai 6,12 persen. Pada umumnya, tingginya kontribusi lulusan menengah terhadap jumlah pengangguran di Indonesia, salah satu disebabkan rendahnya keahlian soft skill khususnya di SMK yang kualitas pendidikannya belum teruji.

Pembekalan keterampilan bagi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah ini akan menjadi aksi yang sangat strategis agar mereka mampu menciptakan usaha sendiri. UMK merupakan salah satu wadah yang paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki skill tinggi. Data SE2016-Lanjutan memberikan informasi bahwa UMK telah menyerap lebih dari 463 ribu, atau lebih dari 88 persen tenaga kerja nonpertanian di Provinsi Bengkulu.

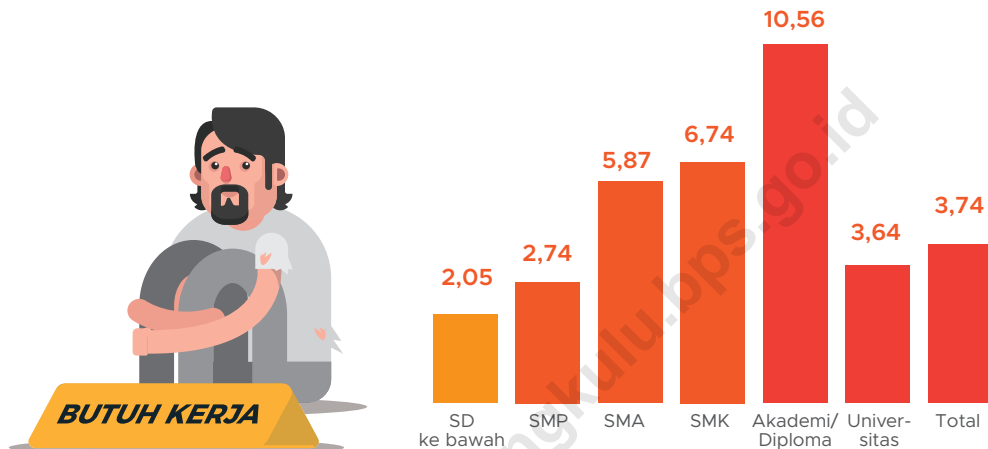
Penyerapan tenaga kerja UMK terjadi paling banyak pada usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan

Sepeda Motor (kategori G) lebih dari 200 ribu jiwa atau mencapai lebih dari 40 persen dari tenaga kerja pada UMK. Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (kategori I) dan Usaha Pendidikan (kategori C) menempati urutan kedua dan ketiga dalam penyerapan tenaga kerja pada UMK. Secara-rata-rata per usaha, UMK kategori Pendidikan (kategori P) memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu sekitar 11 pekerja per usaha/perusahaan. Namun secara umum, rata-rata penyerapan tenaga kerja UMK di Provinsi Bengkulu hanya sebesar 2 pekerja.

**UMK  
SEBAGAI  
PENYERAP  
TENAGA  
KERJA  
TERBANYAK**

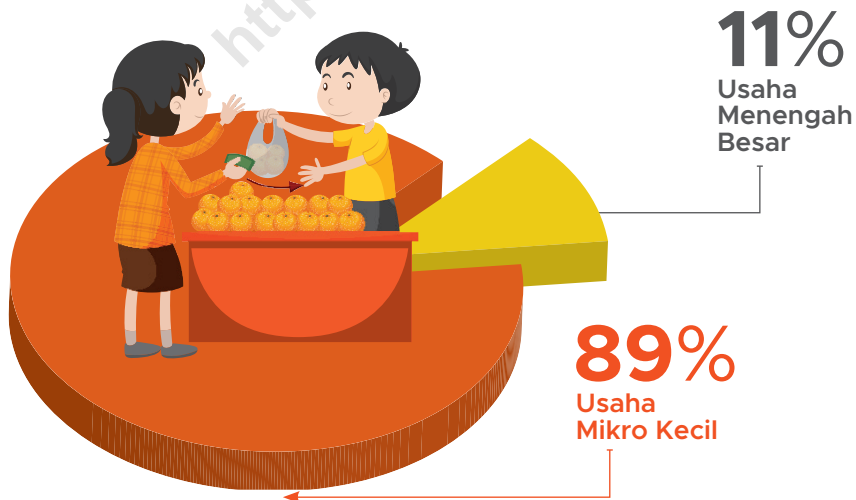


Gambar 2.1.  
Tingkat Pengangguran di Provinsi Bengkulu menurut Pendidikan, 2017



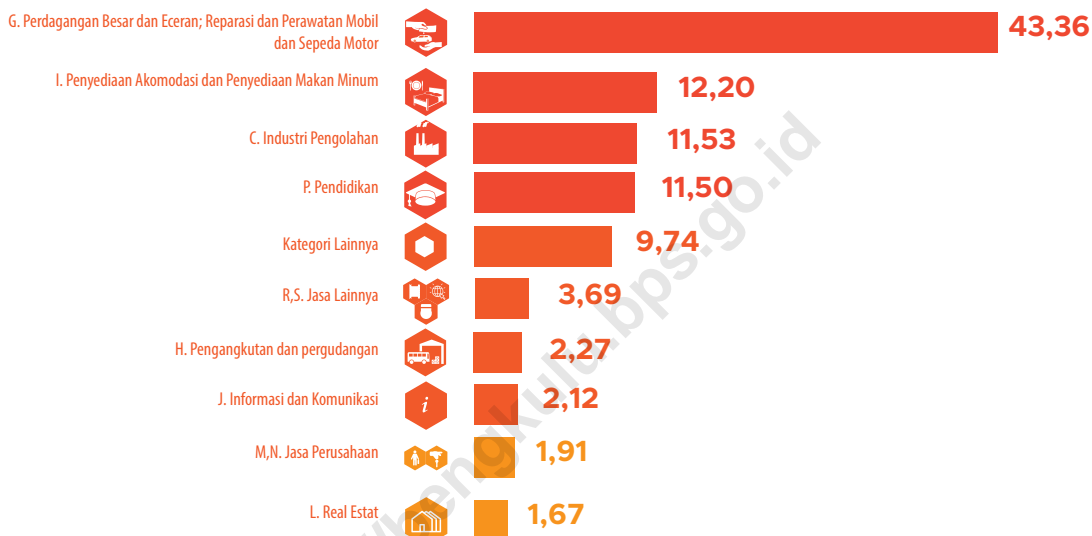
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 2.2.  
Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Status Usaha, 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**Gambar 2.3.**  
**Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UMK Menurut Kategori, 2017**



**Tabel 2.**  
**Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Nonpertanian Menurut Kategori, 2016**

Kategori	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja
C. Industri Pengolahan	22.654	53.476	2
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	103.886	201.054	2
H. Pengangkutan dan pergudangan	7.905	10.513	1
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	26.611	56.573	2
J. Informasi dan Komunikasi	5.963	9.840	2
L. Real Estat	5.705	7.749	1
M,N. Jasa Perusahaan	2.836	8.871	3
P. Pendidikan	4.919	53.340	11
R,S. Jasa Lainnya	6.878	17.086	4
Kategori Lainnya	8.419	45.203	4
<b>Total</b>	<b>195.776</b>	<b>463.705</b>	<b>2</b>

Sumber: BPS, SE2016-L

---

**PENGELOLAAN  
UMK  
DILAKUKAN  
SECARA  
SEDERHANA**

---

Bagian

**3**



## PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA

**P**enerapan tenaga kerja yang besar UMK di Provinsi Bengkulu memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMK. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dan UMK adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar untuk mendapatkan pembinaan, bantuan modal, maupun lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMK sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

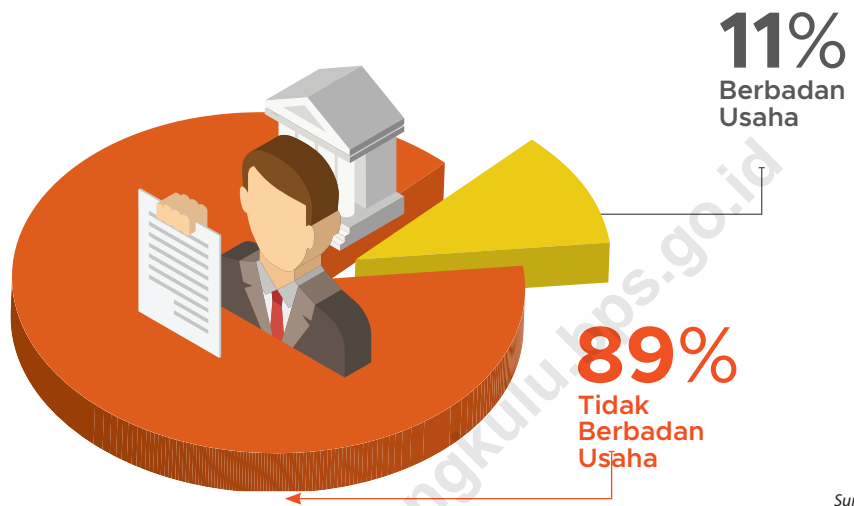
Dari data SE2016 Lanjutan menunjukkan bahwa pengelolaan UMK dilakukan secara sederhana tercermin dari status badan hukumnya, pencatatan keuangan, dan penggunaan komputer. Di Provinsi Bengkulu, jumlah UMK yang tidak berbadan hukum masih sangat mendominasi yaitu mencapai 88,88 persen. Mayoritas UMK juga belum menggunakan komputer dan memanfaatkan internet. Komputer dan internet tidak hanya bermanfaat untuk melakukan laporan

keuangan, juga bermanfaat untuk mendesain produk, pemasaran dan lain-lain. Sayangnya, hanya kurang dari 10 persen UMK yang menggunakan komputer dan memanfaatkan internet.

Untuk meningkatkan pendapatan UMK sekaligus meningkatkan daya saing produknya, kemitraan menjadi salah satu cara yang tepat. Namun demikian, usaha ini masih belum menjadi pilihan bagi UMK. Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Hanya sekitar 7 persen UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

Di antara sektor nonpertanian di Provinsi Bengkulu, UMK pada Kategori P (Pendidikan), Kategori M (Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis) dan Kategori Q (Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial) yang pengelolaannya paling baik. Hal ini tercermin dari variabel-variabel status badan hukum, penggunaan komputer, pemanfaatan internet dan kemitraan.

Gambar 3.1.  
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Badan Hukum, 2017



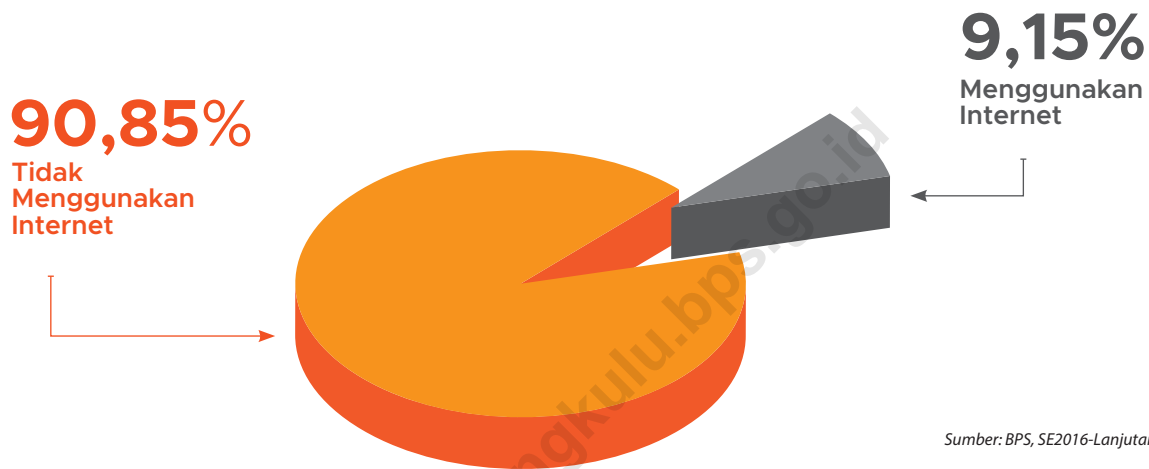
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.2.  
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Komputer dalam Usaha, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.3.  
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Internet dalam Usaha, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.4.  
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Keikutsertaan dalam Kemitraan, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**Tabel 3.**  
**Persentase UMK yang Berbadan Hukum, Mempunyai Laporan Keuangan, Menggunakan Komputer, dan Menjalinkan Kemitraan, 2017**

<b>Kategori</b>	<b>Berbadan Usaha</b>	<b>Menggunakan Komputer</b>	<b>Menggunakan Internet</b>	<b>Menjalinkan Kemitraan</b>
B. Pertambangan dan Penggalian	13,19	0,62	0,14	3,90
C. Industri Pengolahan	11,38	3,32	5,73	8,70
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	11,14	64,36	66,09	22,28
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	0,20	0,00	0,41	10,86
F. Konstruksi	9,18	10,91	13,81	12,12
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	8,04	3,43	6,40	6,85
H. Pengangkutan dan Pergudangan	9,23	1,35	2,39	6,67
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	5,43	1,92	3,42	2,81
J. Informasi dan Komunikasi	4,80	26,93	34,04	12,09
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	61,90	44,91	15,07	7,58
L. Real Estat	3,01	1,38	2,31	0,35
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	29,37	82,88	62,52	29,37
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	21,22	34,81	27,79	11,49
P. Pendidikan	82,39	71,56	58,67	21,14
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	66,40	23,86	33,32	25,96
R. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	19,10	24,90	23,98	5,96
S. Aktivitas Jasa Lainnya	8,97	7,86	16,67	5,28
<b>Total</b>	<b>11,12</b>	<b>7,03</b>	<b>9,15</b>	<b>7,24</b>





---

**PELAKU  
UMK  
MAYORITAS  
PERORANGAN**

---

Bagian

**4**

<https://bengkulu.bps.go.id>

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yaitu pelaku usaha yang merupakan tenaga kerja. Sebagian besar usaha dilakukan secara perorangan. Karena skala usaha yang kecil dan pengelolaannya dilakukan secara sederhana, seluruh proses usaha atau produksi sampai pemasaran dilakukan sendiri oleh pengelola atau pengusaha. Untuk meningkatkan pendapatan UMK, pengelola harus mempunyai bekal dan pengetahuan mengenai bisnis usaha. Hasil data SE2016-Lanjutan menunjukkan lebih dari 80 persen UMK dilakukan secara perorangan. Kategori yang paling banyak dilakukan secara perorangan adalah Pengangkutan dan Pergudangan (kategori H) dan Real Estate (kategori L). Sementara aktivitas Pendidikan (Kategori P) merupakan kategori yang menggunakan tenaga kerja terbanyak diantara kategori UMK lainnya.

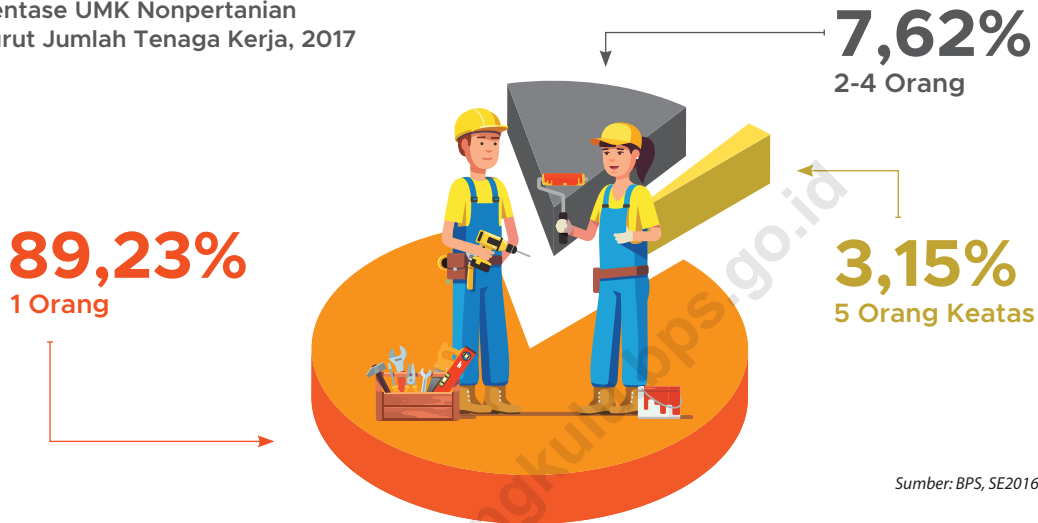
Peranan UMK dalam menggerakkan perekonomian tidak terlepas dari peran perempuan baik sebagai pengusaha maupun tenaga kerja. Secara umum, persentase pengusaha UMK yang berjenis kelamin

perempuan sekitar 40 persen. Meskipun masih rendah dari laki-laki, persentase ini dianggap cukup tinggi mengingat masih berlakunya norma jika laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah. Berpijak dengan hal tersebut dapat diduga jika UMK juga dijalankan sebagai penunjang perekonomian keluarga.

Secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK dalam kategori sedang. Lebih dari sepertiga pengelola berpendidikan SMA/ sederajat ke bawah, paling besar diantara jenjang pendidikan lainnya. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha ini seperti pelatihan-pelatihan.

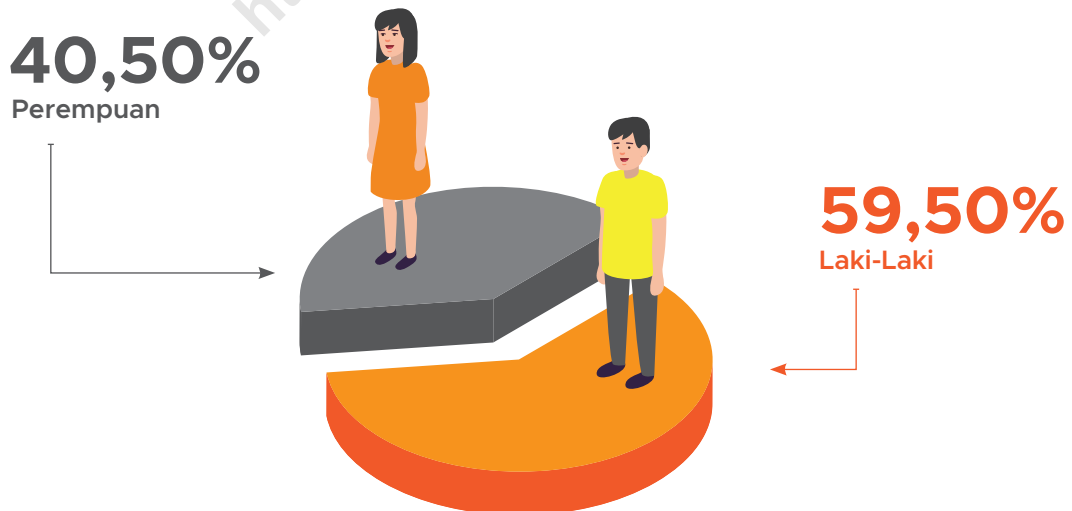
**PELAKU  
UMK  
MAYORITAS  
PERORANGAN**

Gambar 4.1.  
Persentase UMK Nonpertanian  
Menurut Jumlah Tenaga Kerja, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 4.2.  
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Jenis Kelamin, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 4.3.  
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Pendidikan, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan



**Tabel 4.**  
**Persentase UMK Nonpertanian Menurut Kategori dan Status Pekerja, 2017**

Kategori	Tetap dan Kontrak	Tidak Tetap/Harian/ Outsourcing	Tidak Dibayar
B. Pertambangan dan Penggalian	59,74	18,19	22,07
C. Industri Pengolahan	56,95	17,98	25,07
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	61,86	5,30	32,84
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	66,80	1,18	32,02
F. Konstruksi	20,81	79,19	0,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	59,14	8,58	32,28
H. Pengangkutan dan Pergudangan	82,38	13,58	4,03
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	59,64	7,51	32,28
J. Informasi dan Komunikasi	68,25	1,46	30,28
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	78,78	7,48	13,74
L. Real Estat	74,84	1,12	24,04
M, N. Jasa Perusahaan	56,98	26,25	16,76
P. Pendidikan	87,03	10,92	2,04
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	85,32	7,69	7,00
R,S. Aktivitas Jasa Lainnya	59,14	27,60	13,26
Total	64,72	14,44	20,84

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan



---

**KINERJA  
USAHA  
DARI SISI  
KEUANGAN**

---

Bagian

**5**

<https://bengkulu.bps.go.id>

## KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN

**K**inerja usaha merupakan hasil dari kegiatan pemanfaatan sumber daya suatu usaha yang dapat diukur dengan beragam cara, salah satunya adalah laba usaha. Berdasarkan data hasil SE2016 Lanjutan, perolehan laba Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menunjukkan kondisi yang stabil. Namun, sekitar 29,70 persen UMK di Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa keuntungan usaha mereka di tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat, sektor UMK secara keseluruhan mampu menghasilkan pendapatan mencapai lebih dari Rp 123 miliar.

Selain laba usaha, rasio cost to income juga digunakan untuk melihat tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin baik atau semakin menguntungkan usaha tersebut. Pada infografis dapat terlihat bahwa UMK pada kategori L (Real Estat) merupakan kategori lapangan usaha yang paling menguntungkan dengan rasio sebesar 0,21. UMK pada kategori L mampu mendulang pendapatan hingga empat tiga kali lipat biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, Kategori P (Pendidikan), Kategori J (Informasi dan Komunikasi) dan Kategori Q (Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial) merupakan

jenis aktivitas usaha yang memberikan rasio pengeluaran terhadap pendapatan yang cukup rendah dengan rasio diatas 0,70.

Namun demikian, Kategori, L, J dan Q bukanlah usaha yang memberikan rata-rata balas jasa pekerja yang tertinggi. Di Provinsi Bengkulu, kategori P (Pendidikan) memiliki nilai balas jasa pekerja tertinggi, yaitu sekitar 26 juta per pekerja pada tahun 2017. Selanjutnya, aktivitas Konstruksi (kategori F) memberikan balas jasa hamper 24 juta per pekerja pada tahun yang sama.



**Tabel 5.1.**  
**Banyaknya Usaha/Perusahaan dan Rasio Pengeluaran terhadap**  
**Pendapatan UMK Menurut Kabupaten/Kota, 2017**

Kabupaten/Kota	Banyaknya Usaha	Rasio Pengeluaran Terhadap Pendapatan
Bengkulu Selatan	15.460	0,66
Rejang Lebong	26.879	0,68
Bengkulu Utara	26.152	0,67
Kaur	10.271	0,68
Seluma	18.950	0,75
Mukomuko	20.898	0,68
Lebong	11.271	0,66
Kepahiang	12.877	0,70
Bengkulu Tengah	10.796	0,69
Kota Bengkulu	42.275	0,54
<b>Bengkulu</b>	<b>195.775</b>	<b>0,64</b>

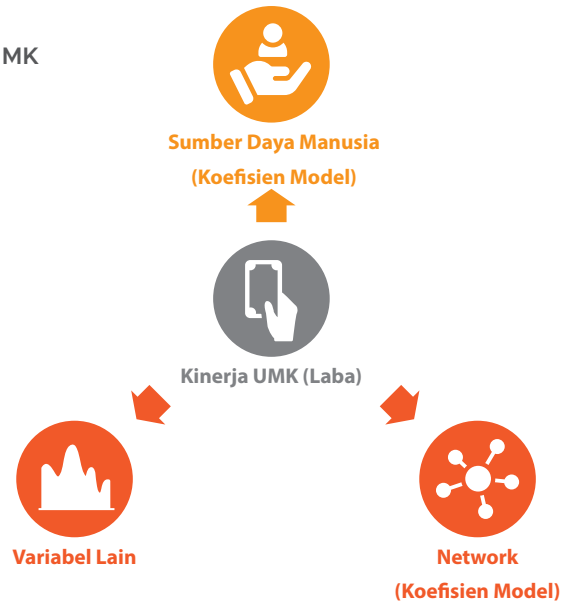
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.1  
Persentase UMK menurut Kondisi Laba 2016 dibanding 2015



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.2.  
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Usaha UMK



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**Tabel 5.2.**  
**Rata-rata Balas Jasa dan Upah Pekerja UMK Nonpertanian Menurut**  
**Kategori (Ribu Rupiah)2017**

Kategori	Balas Jasa
B. Pertambangan dan Penggalian	12.896
C. Industri Pengolahan	11.495
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	12.586
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	10.488
F. Konstruksi	24.388
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	10.896
H. Pengangkutan dan Pergudangan	15.385
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	10.474
J. Informasi dan Komunikasi	7.385
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	11.043
L. Real Estat	10.785
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	14.773
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	11.485
P. Pendidikan	26.940
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	18.195
R. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	11.236
S. Aktivitas Jasa Lainnya	12.964
<b>Total</b>	<b>16.903</b>

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan



---

**PROSPEK  
DAN  
KENDALA  
USAHA**

---

<https://bengkulu.bps.go.id>

Bagian

**6**

**R**PJMN 2005-2019 menargetkan adanya peningkatan usaha-usaha yang berpotensi tumbuh dan inovatif, yaitu usaha yang memiliki prospek bagus di masa mendatang. Dalam SE2016-Lanjutan, prospek adalah harapan atau kemungkinan, dalam hal ini prospek berkaitan dengan kondisi usaha atau tendensi bisnis ke depan baik dari sisi perolehan keuntungan, atau omset. Pengusaha UMK yang menyatakan bahwa usaha mereka akan lebih baik di masa mendatang ada sekitar 36,28 persen.

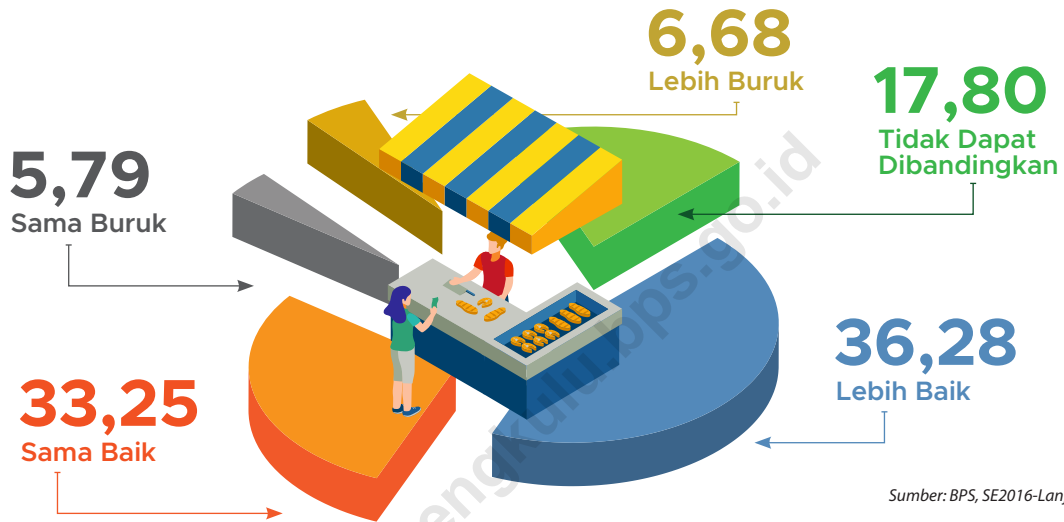
Agar kondisi bisnis ke depan menjadi lebih baik, tentunya diperlukan upaya untuk mengurangi kendala yang dihadapi. UMK di Provinsi Bengkulu sekitar 80 persen memiliki kendala dalam menjalankan usaha. Adanya persaingan dan permodalan merupakan permasalahan utama yang dihadapi. Sekitar 55 persen UMK menyatakan memiliki kendala tersebut.

Permodalan merupakan faktor produksi utama yang harus ada pada setiap proses produksi atau usaha. Oleh sebab itu, akses kredit dari lembaga keuangan merupakan hal yang penting agar UMK dapat meningkatkan kapasitas usahanya. Kebijakan pemerintah dalam pemberian akses kredit untuk UMKM sebetulnya sudah sangat

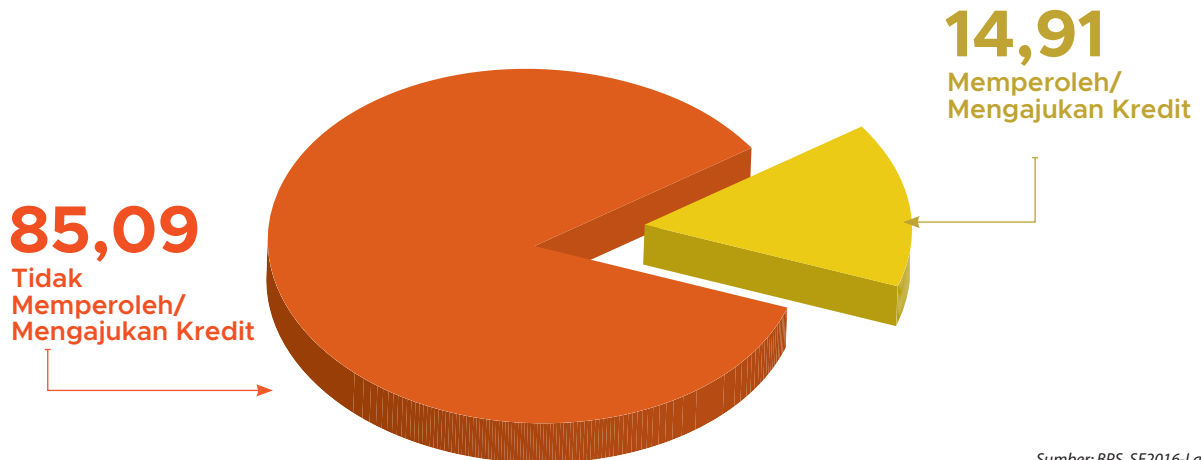
terbuka. Lembaga keuangan saat ini telah banyak memberikan berbagai jenis kredit yang meringankan. Bank Indonesia telah mewajibkan Bank Umum untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM (Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015). Namun hanya sekitar 14 persen usaha yang memperoleh/mengajukan kredit ke lembaga keuangan. Alasan UMK tidak menjadikan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai sumber pemberi modal/usaha utamanya adalah karena alasan bunga tinggi, tidak tahu prosedur dan tidak memiliki agunan.

**PROSPEK  
DAN  
KENDALA  
USAHA**

Gambar 6.1.  
Persentase UMK Menurut Prospek UMK Mendatang



Gambar 6.2.  
Persentase UMK Menurut Akses Permodalan dari Lembaga Keuangan, 2016







# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BENGKULU**

Jl. Adam Malik Km. 8 Bengkulu, 38225.

Telp : (0736) 349117-118, Fax : (0736) 349115

Homepage : <http://bengkulu.bps.go.id> E-mail : [bps1700@bps.go.id](mailto:bps1700@bps.go.id)